

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu :

Fajar Prabowo (2009) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten tahun 1988 – 2007 dengan variabel Independenya yaitu ; Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pembangunan. Penelitian tersebut menggunakan alat analisis Regresi Berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dan memperoleh hasil bahwa Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sementara dalam hipotesis yang dikemukakan penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sehingga kesimpulannya dituliskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten, Oleh karena itu penulis mengimplikasikan terjadinya miss alokasi atau ketidakefisienan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten.

Amin Pujiati (2008) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis Pertumbuhan Ekonomi Karesidenan Semarang era Desentralisasi Fiskal dengan menggunakan beberapa variabel yaitu sumber penerimaan daerah antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Pedapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) , peneliti menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini tidak mendukung teori pertumbuhan Neo Klasik yang beranggapan bahwa modal akan mempercepat pertumbuhan. Hal ini membuktikan meskipun ada keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah, daerah belum dapat menetapkan skala prioritas pembangunan daerah secara optimal atas sektor-sektor pembangunan. Penetapan skala prioritas pembangunan akan memberikan efek multiplier terhadap perekonomian masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Joko Waluyo (2007) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan metode persamaan simultan dengan data panel teknik estimasi *Two Stage Least Square* (TSLS). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atas dasar harga konstan tahun 2003 dan berupa data level pada tingkat propinsi. Data bersifat data panel (*pooled data*) terdiri dari 33 propinsi dan dalam waktu 5 tahun (2001 – 2005). Peneliti tersebut memperoleh kesimpulan bahwa Dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan pendapatan antardaerah lebih terasa di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dibandingkan dengan Kawasan Barat

Indonesia (KBI). Hal ini ditunjukkan dengan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di KTI dan berada diatas rata-rata nasional. Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah yang paling rendah pertumbuhannya dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal. Kesimpulan secara umum menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah.

Hadi Sasana (2006) melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Jalur (*Path Analysis*) melalui analisis regresi. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder berbentuk *time series* dari tahun 2001 sampai 2005, dan data *cross section* yang terdiri atas 35 Kabupaten/Kota. Variabel penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal (X^1), Pertumbuhan Ekonomi (Y^1), dan Kesenjangan Ekonomi antar Daerah (Y^2). Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesenjangan ekonomi antara daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan

yang negatif terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Priyo Hari Adi (2006) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi daerah dan belanja pembangunan terhadap kemandirian daerah di Kabupaten/Kota se Jawa – Bali. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data APBD realisasi pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa-Bali tahun 1998 – 2003. Untuk kepentingan analisis, data akan dikelompokkan menjadi data sebelum dan data sesudah pelaksanaan desentralisasi. Data sebelum desentralisasi adalah data APBD, PDRB maupun pendapatan per kapita untuk tahun 1998 – 2000. Sedangkan data sesudah pelaksanaan desentralisasi adalah data-data yang sama untuk tahun 2001 – 2003. Penelitian tersebut menunjukkan beberapa bukti empiris penting bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sayangnya pertumbuhan ekonomi pemda kabupaten dan kota masih kecil, akibatnya penerimaan PAD-nya pun kecil. Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, penerimaan yang menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya itikad pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih berkualitas. Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah maupun pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan penelitian yang di lakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian atau daerah yang di teliti, rentan waktu data, analisis data, dan salah satu variabel yang di gunakan pada masing-masing penelitian.

2.2 Landasan Teori

Berbagai teori yang akan dikemukakan adalah merupakan dasar dalam perumusan hipotesis dan landasan dalam melakukan analisis penelitian ini. Dalam landasan teori ini akan dibahas mengenai desentralisasi fiskal di Indonesia, hubungan antara otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi, penerimaan daerah (komponen desentralisasi fiskal), Penanaman Modal, dan infrastruktur daerah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori pertumbuhan, antara lain teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan Adam Smith (1723-1790), teori pertumbuhan Solow Swan, dan teori pertumbuhan Harrod Domar. Disamping itu, untuk dapat membandingkan hasil-hasil penelitian sejenisnya atau yang memiliki tema hampir sama secara empiris, maka dilengkapi juga dengan beberapa penelitian terdahulu pertumbuhan ekonomi. Penelitian-penelitian tersebut kemudian digunakan menjadi acuan serta pembanding dalam penelitian ini.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznet dalam Todaro (2006), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis

terhadap tuntutan keadaan yang ada. Menurut Kuznets dalam Suparmoko (2002) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar. Dari kedua faktor ini pertumbuhan produktivitas jelas lebih penting, karena seperti yang ditunjukkan oleh Adam Smith pertumbuhan produktivitas inilah yang menghasilkan peningkatan dalam standar kehidupan. Kuznets sangat menekankan pada perubahan dan inovasi teknologi sebagai cara meningkatkan pertumbuhan produktivitas.

2.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ukuran yang sering di gunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Menurut Todaro (2006), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, termasuk Akumulasi Modal, Pertumbuhan

Penduduk dan Kemajuan teknologi. Menurut Adam Smith dalam Kuncoro (2004) proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat.

Boediono (1992) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, duapuluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri.

2.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori pertumbuhan ekonomi klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Jumlah penduduk, Jumlah stok barang-barang modal, Luas tanah, Kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Namun meskipun pertumbuhan ekonomi tergantung dari banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitik beratkan perhatiannya kepada penambahan penduduk. Ini dikarenakan hukum yang dianut ekonomi klasik yaitu hukum hasil tambahan yang semakin berkurang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak akan terus-menerus

berlangsung, apabila penduduk semakin banyak, maka pertambahannya bukan menaikkan pertumbuhan ekonomi malah akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitasnya telah menjadi negatif. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Apabila Keadaan ini di capai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan yang tidak berkembang (*stationary state*). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsisten*) (Kuncoro, 2004).

b. Teori Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the nature and Cause of the wealth of Nation* mengemukakan tentang konsep pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith ini mudah dipahami, di bedakan menjadi dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu Pertumbuhan output total dan Pertumbuhan penduduk.

1. Pertumbuhan Output total

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga, yaitu Sumber daya alam yang tersedia, jumlah penduduk, dan Stok barang yang ada. Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah Sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan

output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Jumlah penduduk mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal sampai “batas maksimum” dari sumber daya alam).

Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung ini maksudnya adalah karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh tidak langsung maksudnya adalah peningkatan produktivitas per kapita yang dimungkinkan karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar stok modal, maka semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita (Boediono. 1992).

2. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang

akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat.

Tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja (DL) tumbuh lebih cepat dari pada penawaran tenaga kerja (SL). Sementara itu permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja di tentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output (Boediono. 1992).

c. Teori Harrod-Domar

Teori ini mengembangkan analisis keynes dengan dengan memasukan masalah-masalah ekonomi jangka panjang, serta berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik (*steady growth*). Teori Harrod-Domar memiliki beberapa asumsi yaitu:

1. Perekonomian dalam keadaan full employment dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.
4. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save =MPS*)

besarannya tetap , demikian juga dengan rasio penambahan modal output (*capital output ratio = COR*) dan rasio penambahan modal-output (*incremental capital output ratio = ICOR*).

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyetor suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (seperti gedung, peralatan, dan material) yang rusak. Namun untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi-investasi yang baru sebagai tambahan stok modal. Jika dianggap ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (k) dengan total output (Y), maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal output tersebut, hubungan ini dikenal dengan istilah rasio-modal output (COR) (Boediono. 1992).

d. Teori Solow-Swan

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini berdasarkan analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Selanjutnya, menurut teori ini rasio modal-output (COR) dapat berubah dan bersifat dinamis. Untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda

sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, dan sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya fleksibilitas ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu (Boediono. 1992).

Teori pertumbuhan Solow-Swan menggunakan pendekatan fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglass yang dikenal dengan sebutan fungsi produksi *Cobb-Douglass*. Fungsi tersebut dituliskan dalam persamaan sebagai berikut

Q_t = tingkat produksi pada tahun t

T_t = tingkat teknologi pada tahun t

K_t = jumlah stok barang modal pada tahun t

L_t = jumlah tenaga kerja pada tahun t

a = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

b = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

Nilai T_t , a dan b bisa diestimasi secara empiris tetapi pada umumnya nilai a dan b ditentukan besarnya dengan menganggap bahwa $a + b = 1$ yang berarti bahwa a dan b nilainya adalah sama dengan produksi batas dari masing-masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai a dan b ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan output.

2.4 Sumber Penerimaan Daerah

Desentralisasi menurut Undang - Undang No. 32 tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Disamping itu Undang - Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang - Undang No.33 tahun 2004 adalah memberikan kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya dengan meluaskan jangkauan dari bagian pajak dan bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat. Penerapan otonomi daerah yang ditandai dengan desentralisasi pada wilayah Indonesia menyebabkan peningkatan pembangunan regional. Sistem desentralisasi yang menyerahkan kewenangan pada daerah menjadikan masing masing daerah akan berusaha meningkatkan pembangunan didaerahnya masing-masing. Desentralisasi banyak macamnya, namun desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi, karena pemberian kewenangan dibidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal maka akan sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian desentralisasi fiskal akan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal (Kuncoro, 2004).

Berdasarkan teori Tiebout dalam Sukirno 1994 yang menjadi landasan konsep desentralisasi fiskal, bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien. Kondisi peningkatan pelayanan barang publik ini dalam kaitannya hubungan antar daerah otonom akan memberikan kondisi kompetisi persaingan antar kabupaten/kota untuk memaksimalkan kepuasan bagi masyarakat. Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan tersebut adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakatnya, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal, secara tidak langsung memunculkan kompetisi antar daerah otonom dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dimana daerah dengan pelayanan yang baik akan memaksimalkan utilitas masyarakat. Senada dengan Davoodi dan Zou (1998) yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan memunculkan kompetisi atau persaingan antar daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesamaan pandangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan program yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya.

Oates (1993) menyatakan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan *outcome* dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah yang tercipta karena makin pentingnya peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Secara teori, desentralisasi fiskal di perkirakan akan memberikan peningkatan

ekonomi mengingat pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Tanggung jawab fiskal yang semakin besar oleh Pemda dapat menstimulus pembangunan. Hal ini akan berdampak pada hubungan positif yang akan terjadi antara pendelegasian fiskal yang semakin besar dengan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah. Adanya desentralisasi fiskal akan berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi. (Husna, 2015).

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut undang-undang No.33 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan untuk mendanai daerah (Saragih, 2003). Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.4.2 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP). Dana bagi hasil dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan yang dibagi dalam porsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Penerimaan yang di bagi dihasilkan terdiri atas ; Penerimaan Pajak yang mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan PPh Orang Pribadi. Sedangkan penerimaan Bukan Pajak termasuk sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan Umum, Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam dan Sektor Perikanan.

2.4.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan

pembangunan daerah. Dana Alokasi Umum merupakan *block grants* yang diberikan kepada semua kabupaten/kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara pemerintah daerah. Secara definisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut :

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang mengalokasikan didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal Gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal
2. Instrumen untuk mengatasi *horizontal balance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah
3. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menentralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh Daerah.

2.4.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus.

Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

- a. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
- b. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- c. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan yang kurang memadai.
- d. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

2.4.5 Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), daerah juga dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan Pusat.

2.4.6 Lain-lain pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah kepada daerah, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui pemerintah (pusat). Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD (Saragih, 2003).

2.5 Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, penanaman modal pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. (Dumairy, 1996).

Penanaman modal adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital (capital stock). Persediaan kapital ini terdiri dari pabrik-pabrik, mesin-mesin kantor, barang tahan lama lainnya yang dipakai dalam proses produksi. Termasuk dalam persediaan kapital adalah rumah-rumah dan persediaan barang-barang yang belum dijual atau dipakai pada tahun yang bersangkutan (inventory). Jadi penanaman modal adalah pengeluaran yang menambah persediaan kapital. (Suparmoko, 2002).

Didalam neraca nasional atau struktur PDB menurut penggunaan, investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal atau kapital tetap domestik (*domestic fixed capital formation*). Menurut definisi BPS, pembentukan modal tetap adalah pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan atau pembelian-pembelian barang-barang (bukan barang-barang konsumsi) baik dari dalam negeri maupun impor, termasuk barang bekas/modal dari luar negeri.

Untuk lebih menunjang perekonomian, penanaman modal oleh masyarakat perlu digalakkan, terutama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) masih diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai kegiatan yang belum mampu sepenuhnya dilaksanakan dengan PMDN, terutama yang menghasilkan barang modal, bahan baku dan komponen sebagai substitusi impor, barang jadi dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja (Sukirno, 2000).

Penanaman modal selain diperoleh dari swasta (PMA dan PMDN) juga dari pemerintah yaitu belanja modal. Hal ini disebabkan karena belanja modal adalah pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu daerah dimana kenyataannya ketidakberhasilannya suatu daerah menarik modal di daerahnya sendiri disebabkan karena kurangnya prasarana yang tersedia.

2.5.1 Penanaman Modal Swasta

Penanaman modal dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2000). Penanaman modal tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Penanaman modal/investasi merupakan salah satu komponen penentu yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan konsep pendapatan nasional yang mengacu pada A System of National Account (UN, 1968) dalam BPS (2003), pengertian investasi adalah selisih antara stok kapital pada tahun (t) dikurangi dengan stok kapital pada tahun (t-1), atau setiap ada penambahan atau penimbunan modal. Besarnya investasi secara fisik yang direalisasikan pada suatu tahun tertentu dicerminkan oleh besarnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sedangkan yang dimaksud dengan PMTB adalah mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri maupun bekas dari luar negeri, yang termasuk dalam PMTB adalah perbaikan barang modal yang mengakibatkan tambahan umur pemakaian atau meningkatkan kemampuan barang modal tersebut dikurangi dengan penjualan barang modal bekas. Barang yang dikategorikan sebagai barang modal mempunyai ciri-ciri barang tersebut memiliki unsur ekonomis lebih

dari satu tahun, nilai barang relatif besar bila dibandingkan dengan output yang dihasilkan, serta dapat digunakan berulang kali dalam proses produksi.

Penanaman modal swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka penanaman modal swasta dapat di bagi menjadi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

2.5.2 Penanaman Modal Pemerintah

Pembiayaan pembangunan daerah, selain diperoleh dari partisipasi masyarakat yang berupa penanaman modal baik asing maupun domestik, pembiayaan pembangunan daerah juga diperoleh dari belanja modal. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Prabowo Supranto, 2004). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk

kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli.

Menurut Prabowo Supranto (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Priyo Hari Adi (2006) juga menyatakan hal senada, bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan asset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.

Boediono (1992) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Selain dari penanaman modal swasta dan penanaman modal pemerintah, sebenarnya terdapat modal individu yang termasuk kedalam pembentukan modal total domestik bruto (PMTDB) akan tetapi tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan sulitnya mengukur tingkat modal individu.

2.6 Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Pembangunan (PP) termasuk dalam pengeluaran pemerintah yang diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Umumnya biaya pembangunan tersebut diprogramkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek disetiap sektor dan sub sektor. Pengeluaran pembangunan tersebut dialokasikan ke berbagai sektor sesuai dengan urutan prioritas dan kebijakan pembangunan (Pakasi, 2005). Laporan Keuangan Daerah mengalami beberapa perubahan pada Pos Pengeluaran, dari Pengeluaran Pembangunan ke Pengeluaran Daerah menjadi Pengeluaran Pembiayaan. Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dalam APBD Realisasi, pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan.

2.7 Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen

2.7.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No.32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga memacu meningkatkannya kegiatan ekonomi dan menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah meningkat.

2.7.2 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Dana Bag Hasil

Pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada

di daerah (UU No.33/2004). Pendanaan ini digunakan untuk mengatasi kekurangan sumber pajak. Hal ini merupakan karakteristik utama kesepakatan pembiayaan yang mempunyai implikasi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi sumber daya fiskal antar pemerintah (Halim, 2004). Pendanaan ini dapat membuat perubahan kegiatan ekonomi sehingga dapat memicu atau meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi akibat dari kegiatan ekonomi tersebut.

2.7.3 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengeluaran Pembangunan

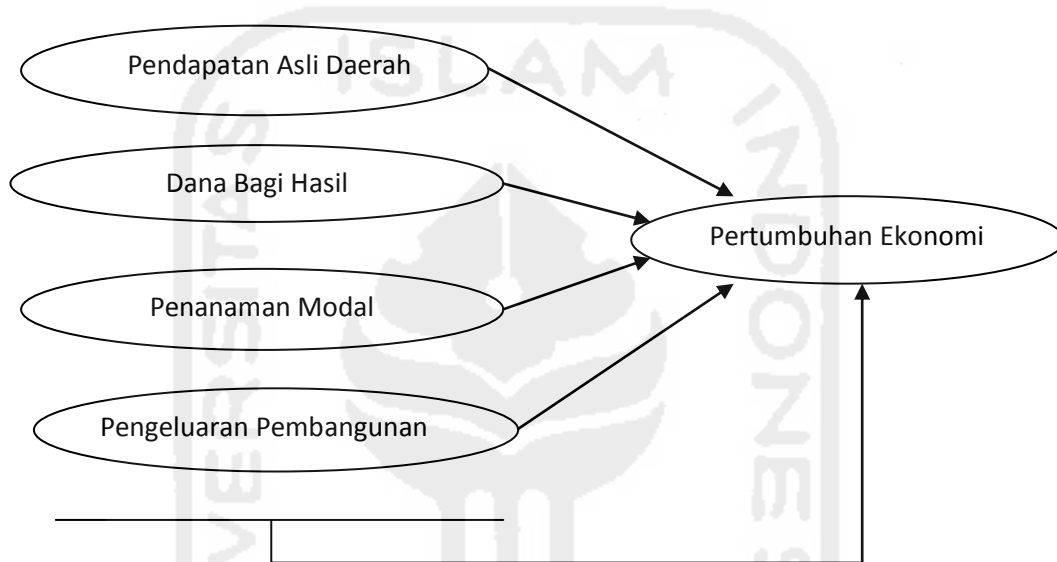
Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya menyebabkan pertumbuhan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama. Pengeluaran Pembangunan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bila pemerintah daerah mampu menyediakan pengeluaran pembangunan yang layak dan benar-benar tepat sasaran serta tidak terjadi inefisiensi kebocoran dan miss alokasi (Jhingan, 2000).

2.7.4 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Penanaman Modal

Penanaman modal swasta dan pemerintah merupakan dana atau modal yang pada umumnya disebut dengan investasi yang merupakan langkah awal kegiatan produksi atau merupakan langkah awal kegiatan pembangunan.

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori tersebut adalah seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teori

Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi sebagai objek utama penelitian, juga sebagai variabel dependen penelitian dan variabel lainnya sebagai variabel independen yakni antara lain : pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, penanaman modal, dan pengeluaran pemerintah. Pemberlakuan sistem desentralisasi fiskal akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Untuk menunjang hal tersebut pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah berupa PAD dan Dana Perimbangan. Jika peningkatan PAD berdampak buruk terhadap

perekonomian maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan pembangunan di era desentralisasi fiskal. Untuk itu diperlukan dana perimbangan sebagai penyeimbang dari melemahnya jumlah PAD yang dihasilkan. Faktor-faktor lainnya seperti penanaman modal dan pengeluaran pemerintah juga merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal merupakan salah satu yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin berkembang suatu daerah akan menarik investasi khususnya investasi swasta untuk masuk ke daerah tersebut (Kusumadewi, 2010).

Desentralisasi fiskal diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan yang dahulunya bersifat sentralistik. Maka dari itu penetapan kebijakan desentralisasi fiskal menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan pendanaan daerah yang lebih proporsional dan merata disetiap daerah khususnya daerah provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian.

2.9 Hipotesis

Berdasarkan Kajian Pustaka dan Landasan Teori yang telah dipaparkan di atas Penulis memperoleh hasil hipotesis sebagai berikut :

- 1) Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 2) Diduga Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 3) Diduga Pengeluaran pembangunan (PP) berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 4) Diduga Penanaman Modal (PM) berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi.